



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul  
Tanggal  
Surat Kabar  
Halaman

: Usulan pembentukan badan eksekusi negara, perlukah?  
: Jumat, 26 September 2025  
: Rakyat Merdeka  
: 2

## Usulan Pembentukan Badan Eksekusi Negara, Perlukah?

Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan mengusulkan agar Presiden membentuk Badan Eksekusi Negara untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang sudah inkraft.

Usulan ini merespons langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengejar ratusan pengemplang pajak mendapat dukungan. Namun, usulan Hinca itu mendapat catatan dari mantan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap.

Kata Hinca, nantinya lembaga ini bertugas mengeksekusi seluruh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraft). "Negara berkewajiban dan tidak boleh kalah, harus hadir di depan untuk mengeksekusinya," tegas Hinca dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Hinca menegaskan upaya Menteri Purbaya untuk memperjuangkan hak negara perlu mendapat dukungan pemimpin negara, setelah mendapat dukungan KPK yang berkeinginan membantu kerja Menteri Purbaya mengejar para wajib pajak.

"Upaya Menteri Keuangan Purbaya harus dilakukan penuh, itu penting dan kita dukung sepenuhnya," ujarnya.

Hinca menilai pembentukan Badan Eksekusi Negara mendeskak dilakukan untuk memastikan keadilan hukum berjalan tuntas hingga akhir. Badan ini, menurutnya, sebaiknya berada langsung di bawah Presiden. Praktis agar tidak ada penghambangan perih dalam melanjutkan eksekusi putusan pengadilan.

"Negara harus mempertahankan keadilan tiba di tangan pencari keadilan. Keadilan tidak boleh menemui jalur buntu. Keadilan harus menyentuh garis finish keadilan itu sendiri. Tak boleh juara tanpa mahkota, juara harus mendapatkan piala mahkota keadilan," pungkas Hinca.

Selanjutnya, KPK menyampaikan positif upaya Menteri Keuangan yang akan membuat 200 orang pengemplang pajak. KPK siap mendukung Menteri Keuangan yang akan menagih para wajib pajak yang memiliki tuntutan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan pihaknya siap bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan langkah tersebut. "KPK tentu sangat terbuka untuk melakukan sinergi dan kolaborasi terhadap pihak siapapun dalam konteks pemberantasan korupsi," kata Jubir KPK, Budi Prasetyo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Sementara itu, mantan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap merilis, pembentukan badan ini memang penting. Namun dia menambahkan, agar lembaga tersebut tidak cukup dibentuk lewat keputusan eksekutif.

Yudi menekankan, Badan Eksekusi Negara harus memiliki dasar hukum berupa undang-undang, agar pekerjaannya tidak sedekar temporer dan benar-benar punya kewenangan. "Kalau hanya lewat keputusan eksekutif rawan dianggap," ujarnya kepada *Rakyat Merdeka*, Kamis (25/9/2025).

Untuk itu, Yudi menyarankan agar lembaga tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Dalam hal pembentukan Badan Eksekusi Negara, berikut wawancaranya.

**YUDI PURNOMO HARAHAP**  
Mantan Penyidik KPK

### Lembaga Ini Harus Dibentuk Dengan UU



“

Ini tentunya bisa memulihkan aset-aset hasil tindak pidana yang kemudian bisa untuk digunakan sebagai PNBP.

**HINCA PANDJAITAN**  
Anggota Komisi III DPR

### Badan Ini Perlu Punya Kewenangan Kuat



“

Karena ada banyak kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi belum dieksekusi. Hakim hanya memutus perkara.

Apa pandangan Anda dengan usulan Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan agar Presiden membentuk Badan Eksekusi Negara untuk menindaklanjuti langkah Menteri Keuangan mengejar 200 pengemplang pajak yang telah pengejarnya? Apakah benar?

Saya setuju jika ada Badan Eksekusi Negara. Namun tentu pekerjaannya tidak hanya mencari aturan ketentuan hukum saja.

Apakah paguannya besar?

Ya harus ditentukan dari *ad hoc* view, yaitu mereka yang harus menuntaskan kasus-kasus yang masih mustahil dihadapi.

Tersusun dalam hal ini mengejar 200 pengemplang pajak. Untuk yang ke pertama, tentu jadi perintah UU Perampatan Aset yang sedang digodok. Sehingga ini sangat penting jika Kemendagri ini sanggup menuntaskan kewenangan hukumnya bagi rakyat Indonesia.

Apakah paguannya besar?

Ini tentunya bisa memulihkan aset-aset hasil tindak pidana yang kemudian bisa untuk digunakan sebagai PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), sehingga namanya bisa berhamburan bagi rakyat Indonesia.

Jadi harus ada undang-undangnya ya?

Selanjutnya kita menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas.

Bagaimana dengan koordinasi lintas lembaga dan menangani pengemplang pajak?

Saya pikir koordinasi ini juga sangat penting untuk saling membangun, untuk bersinergi dan memang ada hal yang mustahil dihadapi KPK.

Kepolisian, dan Kejaksaan Agung terkait dengan kasus-kasus yang masih mustahil dihadapi.

Bagaimana dengan kooperatif dari para pengemplang pajak, sehingga tentu ada ketertiban terhadap tindak pidana?

Seharusnya ada kooperatif, seharusnya ada tindak pidana.

Apakah tantangan utama dalam mengejar ratusan pengemplang pajak?

Itu jelaskan apa dampak positifnya?

Ini tentunya bisa memulihkan aset-aset hasil tindak pidana yang kemudian bisa untuk digunakan sebagai PNBP.

Apakah tantangan utama dalam mengejar ratusan pengemplang pajak?

Ada juga tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berperan (individu atau perusahaan) yang juga diterima oleh negara.

Untuk dasar hukum dari Badan ini, akan seperti apa ya?

Karena ini silakan eksekutif cukup dengan undang-undang saja.

Apakah ini akan berfungsi pada pengemplang pajak saja, atau bagaimana?

Praktis tak ada yang memastikan

Sikap tidak kooperatif dari para pengemplang pajak, sehingga tentu ada ketertiban terhadap tindak pidana?

Seharusnya ada kooperatif, seharusnya ada tindak pidana.

Bagaimana dengan koordinasi lintas lembaga dan menangani pengemplang pajak?

Saya pikir koordinasi ini juga sangat penting untuk saling membangun, untuk bersinergi dan memang ada hal yang mustahil dihadapi KPK.

Kepolisian, dan Kejaksaan Agung terkait dengan kasus-kasus yang masih mustahil dihadapi.

Bagaimana dengan kooperatif dari para pengemplang pajak, sehingga tentu ada ketertiban terhadap tindak pidana?

Seharusnya ada kooperatif, seharusnya ada tindak pidana.

Apakah tantangan utama dalam mengejar ratusan pengemplang pajak?

Ada juga tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berperan (individu atau perusahaan) yang juga diterima oleh negara.

Untuk dasar hukum dari Badan ini, akan seperti apa ya?

Karena ini silakan eksekutif cukup dengan undang-undang saja.

Apakah ini akan berfungsi pada pengemplang pajak saja, atau bagaimana?

Praktis tak ada yang memastikan

Menurut Anda, seberapa penting pembentukan Badan Eksekusi Negara ini?

Sangat penting!

Karena ada banyak kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi belum dieksekusi. Hakim hanya memutus perkara.

Terus kasus apa dong?

Ada juga putusan di Peradilan Agama yang tidak dilaksanakan suntik yang dilakukan oleh para pengemplang pajak.

Banyak juga putusan Pengadilan Agama yang tidak dilaksanakan.

Misalnya dalam memberlakukan pengemplang pajak ini ada kasus yang bisa ditangani oleh KPK, seperti kasus korupsi.

Juga mengawasi apakah putusan itu dipatuhi atau tidak. Fakta yang saya temukan, sangat banyak yang tidak dipatuhi.

Kasus apa jualnya?

Ibu diperlakukan denda atau denda ini. Namun, dia meriyakan agar badan ini tidak hanya fokus pada peradilan agama, tetapi selalu berusaha untuk memenuhi hak-hak juri dan hak-hak dari pembahasan RUU Perampatan Aset namanya. Ada tanggapan?

Itu kasih ditudingmu. Ideanya menarik untuk dituliskan lebih lanjut ya.

Menurut Penyidik KPK Yudi Harahap, pembentukan badan ini akan membantu.

Karena ini silakan eksekutif cukup dengan undang-undang saja. Dia masuk ke lingkup pemerintahan negara (Kementerian Keuangan).

Apakah Badan Eksekusi Negara ini tidak akan tumpang tindih?

Sama sekali tidak. Karena memang belum ada badan serupa.